

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Benda Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8445265 - 8415429
Telp. Fakultas (024) 70798942 Faksimile (024) 8441555 ext. 193
e-mail:humas@unika.ac.id



SURAT TUGAS

Nomor: 0165/B.8.10/ST/FEB/III/2016

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata memberikan tugas kepada:

- Nama : Dr. Widuri Kurniasari, MSi. NIDN : 0610057601
- Status : Tenaga Pendidik / Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.
- Tugas : Menulis Artikel dengan judul :
Kantong Plastik Berbayar : Sungguh Hijaukah ?
Dimuat di Surat Kabar Harian RADAR terbitan tanggal
30 Maret 2016
- Tempat : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Katolik Soegijapranata.
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Semarang.
- Waktu : 23 - 30 Maret 2016
- Keterangan : Harap melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta memberikan laporan setelah melaksanakan tugas

Semarang, 29 Maret 2016
Dekan,

SENTOT SUCIARTO A, Ph.D
NPP: 058.1.1988.030

Telah melaksanakan tugas
Mengetahui :

()

Kantong Plastik Berbayar, Sungguh Hijaukah?

KEBIJAKAN kantong plastik berbayar, sudah dicanangkan pada Hari Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari 2016. Selama tiga bulan, pasar swalayan di 23 kota di Indonesia menjadi tempat uji coba kebijakan ini. Alasan yang melatarbelakangi program ini adalah meningkatnya jumlah sampah plastik setiap hari, apalagi bahan plastik sangat sulit diuraikan.

Alasan ini cukup kuat karena dari data di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH-K) menyebutkan Indonesia adalah penghasil sampah plastik yang dibuang ke laut terbesar kedua dunia. Indonesia menghasilkan 187,2 juta ton setelah Tiongkok yang

mencapai 262,9 juta ton. Untuk itu, bila laju penggunaan plastik tidak dikurangi, ini akan mengancam kelestarian lingkungan.

Kebijakan kantong plastik berbayar ini mengacu pada Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (Ditjen PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH-K) Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Kebijakan kantong plastik berbayar ini, sebenarnya sudah lama disosialisasikan. Namun masih menuai pro dan kontra. Di beberapa daerah sudah



Oleh:
Widuri Kurniasari

mulai di berlakukan, namun ada juga yang menolak.

Alasan penolakan lebih didasari pada ketidakefektifan untuk menekan

sampah plastik jika kantong plastik masih dijual dengan harga rendah ataupun tinggi. Selain itu, kantong plastik berbayar akan menimbulkan bisnis pengusaha di bidang tersebut, alasannya uang dari kantong plastik berbayar ini akan lari ke keuntungan Ritel yang menerapkan kantong plastik berbayar dan hal ini merugikan konsumen.

Yang menjadi pertanyaan penting adalah apakah kebijakan ini akan efektif dan sungguh hijaukah kebijakan ini untuk mengurangi sampah plastik? Tak ada yang menjamin. Argumentasinya adalah, pengurangan sampah plastik, bisa diprediksikan jumlahnya tidak akan berarti. Sebab, menurut data Nielsen 2015,

penggunaan plastik dari industri ritel -- toko swalayan (minimarket, supermarket, hipermart, dan perkulakan) -- di Indonesia hanya sebesar 26 persen dan 74 persen berasal dari pasar rakyat atau pasar tradisional. Padahal kebijakan kantong plastik berbayar ini, belum menyentuh pasar tradisional.

► Baca *Kantong...* hal 11



Kerjasama Radar Semarang dengan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Unika Soegijapranata Semarang

Justru Untungkan Peritel, Merugikan Konsumen

■ KANTONG

Sambungan dari hal. 3

Namun, tidak sedikit juga pihak yang optimis dengan kebijakan ini. Mereka beranggapan bahwa dana dari kantong plastik berbayar ini dapat digunakan pengelola walayan-ritel untuk melakukan aktivitas sosial melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Namun, kembali

lagi, yang menjadi pertanyaan besar, apakah pemaknaan untuk CSR ini sesederhana itu? Sebab semestinya CSR diambilkan dari keuntungan perusahaan. Bukan dari hasil penjualan kantong plastik berbayar.

Kalau ditelisik lebih jauh lagi ternyata kebijakan kantong plastik berbayar ini lebih menguntungkan buat peritel dan cenderung merugikan konsumen. Karena

selama ini kantong plastik diberikan kepada konsumen sebagai bagian dari layanan pengelola ritel. Dan yang perlu ditinjau lagi, adalah bentuk pengawasan dari dana kantong plastik berbayar ini, apakah betul-betul digunakan untuk aktivitas yang terkait dengan pelestarian lingkungan? (*)

**) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika*

Soegijapranata Semarang